

# Kontribusi Pemikiran Al-Mawardi terhadap Kejatuhan Presiden Hosni Mubarak

Abisaty Kurnia Jati<sup>1,a)</sup>, Hamas Nurhan Rabbani Tunggal<sup>2</sup>  
<sup>1,2</sup>Universitas Sebelas Maret, Indonesia

<sup>a</sup> Corresponding author: abisatyaj@student.uns.ac.id

## Abstrak

Kejatuhan rezim pada era Hosni Mubarak menjadi salah satu peristiwa paling bersejarah bagi rakyat Mesir. Setelah 30 tahun dipimpin oleh presiden yang otoriter, rakyat Mesir pun akhirnya berhasil menggulingkan pemerintahan melalui revolusi. Sikap rakyat yang menentang pemimpinnya itu dilandasi oleh perilaku Mubarak yang tidak adil dan kurang mencerminkan sosok pemimpin. Maraknya kasus korupsi, kesenjangan ekonomi, dan praktik otoritarian merupakan beberapa contoh ketidakadilan yang dilakukan oleh Hosni Mubarak. Permasalahan tersebut akan dibahas pada penelitian ini melalui penjelasan secara runtut dari era awal mula kepemimpinan Mubarak sampai kejatuhannya. Penelitian ini juga akan membahas mengenai peristiwa penggulingan presiden Hosni Mubarak oleh rakyatnya yang dilihat dari kacamata teori kenegaraan menurut al-Mawardi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan model idiosinkratis untuk mengetahui pola kepemimpinan Mubarak saat menjabat sebagai presiden.

**Keywords:** *Hosni Mubarak; Mesir; Revolusi*

## Pendahuluan

Pada tahun 1922, Inggris menghadiahkan sebuah kemerdekaan kepada Mesir. Hal tersebut dilandasi oleh sebuah peristiwa revolusi yang dilakukan rakyat karena penangkapan Saad Zaghloul, seorang negarawan Mesir. Meskipun sudah dinyatakan merdeka, namun Mesir tetap tak bisa lepas dari peran Inggris dalam urusan negaranya (Wasiuddin, 2021). Pasca kemerdekaan, bentuk pemerintahan Mesir itu berupa kesultanan yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Fuad I yang juga merupakan kaki tangan Inggris. Pada masa pemerintahannya, Raja Fuad I merupakan seorang pemimpin yang cukup otoriter dan tidak menganggap hak-hak rakyat. Dengan adanya hal tersebut, krisis pun sering terjadi di dalam gejolak politik dalam negeri Mesir (Trisnawati, 2016). Krisis pun terus meningkat meskipun adanya pergantian kekuasaan ke Raja Farouk. Pada masa itu, banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah kesultanan Mesir sehingga keadilan pun tidak ditegakkan. Menanggapi kasus tersebut, rakyat Mesir pun mulai merasa kesal sehingga berencana melakukan revolusi besar-besaran. Melalui gerakan besutan Hasan al-Banna yaitu Ikhwanul Muslimin, mereka dibantu oleh perwira bebas militer pimpinan

Gamal Abdul Nasser (al-Ayubbi, 2016). Semenjak keberhasilan penggulingan rezim kesultanan tersebut, pemerintahan mesir pun dikuasai oleh militer yang memiliki landasan sistem politik sosialis (Ghafur, 2014).

Pasca diturunkannya Anwar Sadat (Presiden Mesir sebelumnya) dikarenakan meninggal, Hosni Mubarak yang sebelumnya merupakan Wakil Presiden Mesir pun diangkat oleh Majelis Al-Sya'ab dan Majelis Al-Syuura untuk menjadi pemimpin negara tersebut (Wasiuddin, 2021). Pada awal kiprahnya sebagai seorang presiden, Hosni Mubarak langsung menghangatkan kembali hubungan mesir dengan negara-negara timur tengah yang sebelumnya kurang baik dengan kembali ke Liga Arab. Selain itu, Mubarak juga berusaha untuk mendinginkan konflik yang terjadi antara Mesir dan Israel karena ingin tetap menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat sebagai pendonor terbesar di negara tersebut (Tikkanen, 2021). Seiring berjalannya waktu, pemerintahan Hosni Mubarak pun sebenarnya berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi makro. Mengingat sistem politik Mesir yang sudah berubah menjadi liberal di masanya, namun hal tersebut juga membuat ketimpangan sosial semakin memburuk (Nugroho, 2012).

Keburukan semacam itu sebenarnya sudah tercermin pada janji-janji yang beliau katakana kepada rakyatnya perihal ekonomi selama kepemimpinannya. Entah itu pengangguran, perluasan lapangan kerja, dan pemberantasan korupsi pun gagal dilakukan. Krisis secara ekonomi semacam itu pun membuat rakyatnya semakin menderita sehingga setengah lebih dari jumlah penduduk berada di dalam garis kemiskinan (Nugroho, 2012). Salah satu yang paling menonjol adalah kasus korupsi akibat dari perpanjangan masa kepemimpinan presiden Hosni Mubarak. Semua perlakuan tidak adil semacam itu pun mulai dilawan oleh rakyatnya pada tahun 2010 di mana kelompok oposisi sudah berani bersuara dan menghimpun empati dari masyarakat (Nugroho, 2012).

Seperti yang telah dijelaskan, secara garis besar Mesir di bawah Hosni Mubarak menjadi negara otoritarian. Menjelang akhir jabatannya, Hosni Mubarak harus menghadapi protes dan perlawanan dari rakyat Mesir yang sudah menderita, khususnya secara politik dan ekonomi selama masa pemerintahannya. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana kontribusi pemikiran Al-Mawardi terhadap kejatuhan Hosni Mubarak dari jabatan presiden Mesir. Penggunaan pemikiran Al-Mawardi dalam penelitian ini dinilai sejalan dengan realitas pemerintahan era Hosni Mubarak yang tanpa wakil presiden. Lebih lanjut, pemikiran Al-Mawardi juga didukung oleh model idiosinkratik dari Margaret Hermann.

Adapun, studi literatur yang menjadi rujukan dalam penelitian ini antara lain: jurnal berjudul "Pemikiran Politik Islam Imam al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia" yang tercantum dalam Jurnal Ilmiah Al-Hadi tahun 2018 dan ditulis oleh Dr. Syafruddin Syam, M.Ag secara garis besar menjelaskan mengenai bagaimana komparasi pemikiran Mawardi perihal konsep kenegaraan di Indonesia. Beliau menyimpulkan bahwa pemilihan

presiden dan wakilnya di Indonesia itu kurang bisa mewakili pilihan rakyat. Beliau mengatakan bahwa menurut Mawardi, seorang pemimpin itu harus dipilih langsung oleh rakyatnya dan berdampak bagi mereka sendiri. Beliau juga berpendapat bahwa kurang “merakyatnya” *ahlul hal wal aqd* membuat pola pemerintahan di Indonesia cukup kurang adil. Di Indonesia itu cenderung berbasis partai sehingga nantinya siapapun calon yang terpilih hanya akan menguntungkan dirinya sendiri. Konsep kenegaraan Mawardi di dalam jurnal ini dijadikan pembandingan terkait mana yang baik maupun sebaliknya. Meskipun Indonesia sistem politiknya itu republik presidensial, namun dalam hal ini sebenarnya bisa mencontoh konsep kenegaraan yang bisa bertindak seadil-adilnya bagi semua golongan.

Jika dihubungkan dengan penelitian ini, penulis berpendapat bahwa adanya konsep kenegaraan al-Mawardi yang membahas sebuah negara non-khilafah namun mayoritas islam menjadikan jurnal ini sangat cocok untuk dijadikan *literature review*. Hal itu juga diperkuat dengan konsep pemerintahan yang dikatakan “kurang adil bagi rakyat” oleh penulis jurnal tersebut membuat tulisan ini sangat cocok jika dijadikan pedoman sebagai landasan penelitian terdahulu. Perihal pembeda jurnal sebelumnya dengan tulisan ini, hal tersebut terdapat pada negara yang dikaji. Selain itu, peristiwa yang dihadapi pun sama-sama berbeda karena dalam tulisan ini akan melihat bagaimana ketidakadilan yang dilakukan pemerintah itu menuai konflik dengan rakyat. Dengan adanya hal tersebut diharapkan tulisan ini dapat melakukan pembaruan-pembaruan terhadap aspek-aspek bahasan yang bersinggungan namun berbeda variabel.

Penelitian ini kemudian menggunakan artikel berjudul “Implikasi Idiosinkratik Barack Obama terhadap Kebijakan Kerjasama Kontraterorisme Amerika-Arab Saudi” sebagai *literature review* kedua. Artikel ini ditulis oleh Ikko Vidia Nandareska dan diterbitkan dalam *Journal of International Relations* pada tahun 2018. Artikel karya Nandareska tersebut secara garis besar membahas tentang idiosinkratik yang ada pada diri Barack Obama dalam kebijakan kerjasama kontra terorisme Amerika-Arab Saudi. Nandareska memiliki kesimpulan yaitu Barack Obama merupakan pemimpin yang bersifat “mendamaikan” atau konsiliator dan latar belakang serta pengalaman hidupnya memiliki implikasi terhadap kebijakan tersebut. Kesimpulan dalam artikel tersebut diperoleh melalui analisis yang menggunakan lima indikator karakteristik personal Margaret Hermann.

Penggunaan indikator karakteristik personal menurut Margaret Hermann menjadikan artikel jurnal tersebut sebagai *literature review* yang relevan bagi penelitian ini. Hal ini dikarenakan karakteristik personal Margaret Hermann dinilai sesuai untuk menganalisis idiosinkratik dari Presiden Mesir, Hosni Mubarak. Kemudian terkait perbedaan dengan penelitian ini, artikel jurnal karya Nandareska tersebut mengambil Presiden Amerika Serikat, Barack Obama sebagai figur pemimpin yang dianalisis idiosinkratiknya terhadap salah satu kebijakan negara. Selain itu, perbedaan yang lain

adalah artikel jurnal ini mengkaji kebijakan Amerika Serikat yang terkait dengan urusan luar negeri, karena terkait dengan kontra terorisme dengan Arab Saudi.

Sedangkan permasalahan yang hendak diteliti, yaitu Bagaimana kontribusi pemikiran al-Mawardi terhadap kudeta Mesir di era Hosni Mubarak? Di samping itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kejatuhan rezim Mesir di era Hosni Mubarak jika dianalisis menggunakan teori al-Mawardi

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk pengumpulan datanya. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dikumpulkan data-datanya berupa kata-kata dan bukan angka. Data tersebut diperoleh dari hasil catatan lapangan, wawancara, foto, video, catatan, dokumentasi pribadi, dan dokumentasi lainnya (Moleong, 2005). Metode pengumpulan data merupakan langkah yang harus dilakukan dalam penelitian karena mendapatkan data merupakan tujuan utama dari dilakukannya sebuah penelitian (Sugiyono, 2006). Penulis akan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan melakukan pendekatan melalui studi pustaka. Hal itu karena peristiwa yang sudah selesai membuat pendekatan dengan studi pustaka harus dilakukan. Dalam melakukan penelitian, penulis akan melakukan riset menggunakan jurnal-jurnal, *website*, dan buku sehingga validitasnya pun terjamin. Selain itu, penulis juga berusaha menyaring jurnal-jurnal yang kredibel sehingga datanya pun bisa dianggap valid. Dalam proses menyaring kredibilitas sumber data, penulis berusaha merelasikan setiap jurnal agar sesuai dengan pembahasan.

### **Kerangka Teori**

#### *Al-Mawardi's State Theory*

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan landasan teori kenegaraan dalam islam milik al-Mawardi. Sebelum politik pemerintahan yang didominasi oleh barat, beberapa tokoh islam pun sebenarnya sudah menemukan beberapa konsep kenegaraan. Abu Al Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib Al Bashari Al Baghdadi atau Al-Mawardi merupakan salah satu contoh tokoh islam yang memberikan pengaruh besar terhadap konsep-konsep kenegaraan di dalam islam. Salah satu karya yang dibuat oleh tokoh Sunni ini adalah *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah* yang menjabarkan terkait teori-teori politik kenegaraan di dalam islam. Semua pemikiran al-Mawardi terkait kenegaraan itu didapatkan melalui realitas politik pada zamannya, dan beberapa gurunya seperti Al Hasan ibn Ali ibn Muhammad, Muhammad ibn 'Adi ibn Zuhair Alman Qiei, dan Abdul Qosim Al Qusyairi (Syam, 2018). Dalam konsep kenegaraan, Mawardi membagi beberapa bagian dalam pemerintahan yaitu khilafah, wazir, dan pemimpin-pemimpin di daerah (gubernur) (Ahyar, 2018). Menurut Mawardi dalam kitab *durorus suluk*, beliau menekankan bahwa pemerintahan yang baik itu ada jika memiliki beberapa sifat di antaranya *alraghbab*

(pemimpin yang totalitas dalam menjalankan amanahnya), *alrabbab* (pemimpin yang memiliki wibawa), dan *alinshaf* (pemerintahan yang jujur). Dengan adanya hal tersebut, Mawardi berpendapat bahwa kunci utama negara bisa berhasil adalah ketika pemimpinnya pun berkompeten dalam menjalankan amanahnya (Ahyar, 2018).

Perihal kekhalifahan, Mawardi berpendapat bahwa seorang khilafah itu bisa dikatakan sebagai pengganti nabi. Maksudnya di sini adalah seorang khilafah itu harus memimpin negara dan rakyatnya dengan bersikap adil sama seperti nabi (Ahyar, 2018). Menurut Mawardi, seorang khalifah atau kepala negara wajib menjalankan sepuluh tugas antara lain menjaga dasar agama, bersikap adil, menegakkan hukum, menjaga negaranya, membangun kekuatan untuk pertahanan negara, mempertahankan eksistensi agama islam, memungut pajak, mengelola pajak, mengangkat pejabat yang kompeten, dan terjun langsung ketika ada permasalahan di dalam sistem pemerintahannya (Syam, 2018). Dari beberapa tugas tersebut, dapat dilihat bahwa peran seorang khilafah sangatlah vital karena bakal mempengaruhi kejayaan sebuah kerajaan maupun negara. Dengan adanya hal tersebut, pemilihan seorang khalifah pun memiliki mekanisme yang cukup ketat. Menurut Mawardi, ada dua metode pemilihan seorang khalifah yaitu melalui *ahl al halli wa al 'aqdi* atau penunjukkan langsung oleh pemimpin sebelumnya. Namun untuk menentukan kandidat-kandidat khilafah, itu harus melalui pemilihan dari Dewan Pemilih (*ahl al ikhtiar*) atau Dewan Imam (*ahl al imamah*). Pemikiran semacam itu diambil dari konsep-konsep suksesi yang sudah dilakukan oleh nabi maupun *khulafaurrasyidin* (Diana, 2014).

Dalam konsep kenegaraannya, sebenarnya pemikiran Mawardi ini sama saja dengan teori kontrak sosial yang digagas oleh Thomas Hobbes dan John Locke. Pemerintahan dan rakyat memiliki kesepakatan untuk membangun sebuah kontrak sehingga sama-sama memiliki keuntungan. Rakyat memberikan mandatnya kepada pemimpin untuk memimpin sebuah negara secara adil sehingga tidak boleh bersikap seenaknya (Wijaya, 2016). Dalam pemikiran Mawardi, kontrak sosial ini disebut dengan bay'ah. Konsepnya pun sama persis yang dikemukakan oleh Hobbes, intinya pemimpin dan rakyat memiliki tugas masing-masing yang bertujuan untuk kesejahteraan. Menurut Mawardi, seorang khilafah berhak diturunkan jika beliau memiliki kecacatan. Cacat yang dimaksud itu meliputi kecacatan fisik sehingga dapat mempengaruhi kiprahnya dalam menjalankan sebuah negara, dan kecacatan pola pikir yang membuat pemimpin tersebut mulai berperilaku seenaknya sendiri dan tidak memperhatikan kepentingan rakyat. Jika hal tersebut terjadi, kontrak sosial pun tercoreng sebab salah satu pihak mulai mengkhianati perjanjian (Wijaya, 2016). Hal tersebut sangat berhubungan dengan pola pemerintahan Hosni Mubarak yang cenderung cacat secara pola pikir sebagai seorang pemimpin sehingga menyebabkan beliau dilengserkan dari jabatannya oleh rakyatnya sendiri.

### *Idiosyncrasies Model*

Guna melengkapi pembahasan dan mendukung pemikiran Al Mawardi, penelitian ini menggunakan Model Idiosinkratik untuk menganalisis Hosni Mubarak lebih mendalam secara personal atau individu. Model idiosinkratik ini memiliki fokus terhadap karakteristik atau kepribadian milik individu yang mengambil keputusan (Laksono, 2018). Karakteristik yang dimiliki oleh individu sebagai figur pemimpin akan berkaitan secara langsung terhadap politik dan kebijakan yang dijalankan oleh negara. Hal ini didukung oleh pendapat Margaret Hermann yang menyebutkan bahwa pemimpin dapat memberikan pengaruh kepada pemerintahan apakah menuju agresif atau damai dengan negara lain (Hermann, 1980).

Dalam artikel berjudul “*Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristics of Political Leaders*”, Hermann menyebutkan tentang karakteristik personal atau individu (Hermann, 1980). Pertama *nationalism* yang merupakan penempatan prioritas bangsa/negaranya. Pemimpin yang memiliki jiwa nasionalisme tinggi cenderung memiliki sikap yang menekankan pada kehormatan dan identitas nasional. Kedua *distrust to others* yang berkaitan dengan rasa ketidakpercayaan kepada pihak lain. Pemimpin yang memiliki tingkat ketidakpercayaan yang rendah cenderung bersikap kooperatif kepada pihak lain. Ketiga *need for affiliation* yang dapat diartikan sebagai kebutuhan untuk berafiliasi. Keempat *conceptual complexity* yang merupakan cara pandang individu dalam mengolah informasi tertentu. Individu dengan tingkat kompleksitas konseptual tinggi cenderung melihat dunia melalui sudut pandang yang luas, sehingga menerima alternatif dan pandangan dari pihak lain. Kelima *belief in own ability to control events* yang merupakan keinginan untuk mendominasi kekuasaan. Hal ini dikarenakan individu tersebut menyadari keterbatasan dan masih membutuhkan partisipasi dari pihak lain. Keenam *need for power* yang dapat diartikan sebagai usaha mendirikan, memperbaiki, dan mengembalikan kekuasaan serta pengaruh terhadap yang lain. Dari enam karakteristik tersebut, Hermann juga menyimpulkan bahwa pemimpin yang agresif cenderung memiliki tingkat *need for power* tinggi, *conceptual complexity* rendah, *distrust to others* tinggi, *nationalism* tinggi, dan *belief in own ability control events* tinggi. Sedangkan pemimpin yang bersifat “mendamaikan” atau *conciliatory* cenderung memiliki tingkat *need for affiliation* tinggi, *conceptual complexity* tinggi, *distrust to others* rendah, *nationalism* rendah, dan *belief in own ability control events* rendah.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Kehidupan Singkat Hosni Mubarak**

Muhammad Hosni El-Sayed Mubarak lahir pada tanggal 4 Mei 1928 di sebuah desa kecil yang bernama Kafr-El Meselha, Provinsi Minufiya, Mesir bagian utara. Terlahir dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah, Hosni Mubarak memegang teguh nilai-nilai yang

diajarkan oleh orang tuanya, salah satunya adalah pentingnya memperoleh pendidikan. Hosni Mubarak kemudian masuk akademi militer Mesir pada umur 19 tahun dan lulus pada tahun 1949. Karena semangat ingin terus memperoleh pendidikan, Hosni Mubarak kemudian masuk ke akademi angkatan udara Mesir dan beberapa tahun kemudian melanjutkan ke akademi angkatan udara di Moskow. Melalui pengalaman di akademi angkatan udara, Hosni Mubarak memiliki peran penting dalam pertempuran Mesir, beberapa di antaranya adalah 1967 *Six-Day War* dan 1973 *Yom Kippur War*.

Hosni Mubarak memutuskan untuk berkeluarga dan menikah dengan Suzanne Thabet pada tahun 1959. Suzanne Thabet, istri Hosni Mubarak memiliki latar belakang kondisi ekonomi yang lebih beruntung karena berasal dari keluarga yang berkecukupan. Namun perbedaan kondisi tersebut bukan menjadi penghalang bagi keduanya dan pada tahun, Hosni Mubarak dan Suzanne Thabet dikaruniai anak pertama yang diberi nama Alaa Mubarak. Kemudian pada 1963, lahir anak kedua Hosni Mubarak yang bernama Gamal Mubarak. Hosni Mubarak tetap memegang nilai dari orang tuanya yaitu pentingnya memperoleh pendidikan dengan memberikan fasilitas pendidikan yang lebih dari masa kecil untuk kedua anaknya.

Hosni Mubarak dikenal dalam karir politiknya ketika ditunjuk menjadi wakil presiden Mesir pada era Anwar Sadat tahun 1975. Sepanjang era pemerintahan Anwar Sadat, Hosni Mubarak menjadi orang yang sangat dekat dengan presiden. Presiden Anwar Sadat bersama Hosni Mubarak aktif melakukan promosi bertajuk perdamaian dengan Israel kepada negara-negara Arab, meskipun diisukan bahwa Hosni Mubarak tidak setuju dengan 1978 *Camp David Accords*. Kemudian pada 6 Oktober 1981, terjadi pembunuhan Presiden Anwar Sadat oleh perwira angkatan darat Mesir, Khalid El-Islambouli yang tidak setuju terhadap penandatanganan *Camp David Accords*. Delapan hari pasca pembunuhan Anwar Sadat, tepatnya pada tanggal 14 Oktober 1981 Hosni Mubarak melanjutkan karir politiknya dengan naik jabatan sebagai presiden Mesir.

Sebagai presiden, Hosni Mubarak harus dihadapkan pada berbagai tantangan di awal jabatannya (Khasyi'in 2019). Pertama adalah kondisi dimana ketika itu Mesir sedang dikucilkan oleh negara-negara Arab karena berdamai dengan Israel. Kedua, Hosni Mubarak harus berhadapan dengan para tahanan politik yang ditangkap pada masa Anwar Sadat. Ketiga, Mesir memiliki hutang luar negeri yang banyak sebagai akibat dari pengeluaran perang dan pengucilan oleh negara-negara Arab. Kemudian, Hosni Mubarak juga dihadapkan pada tantangan ideologis dan politik dari Ikhwanul Muslimin.

Pada periode pertamanya, Hosni Mubarak mulai melakukan normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab. Selain itu, Hosni Mubarak juga memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat dengan tujuan untuk memperbaiki ekonomi Mesir dan memperkuat posisi di dunia Arab. Pada urusan domestik, Hosni Mubarak melonggarkan sensor media, berupaya mengurangi korupsi peninggalan era Anwar Sadat, dan berusaha

menjadikan Mesir sebagai negara yang *less authoritarian* dengan toleran terhadap kelompok oposisi politik (Khasyi'in 2019). Pada periode kedua, Hosni Mubarak berhasil mengembalikan Mesir sebagai bagian dari Liga Arab dan memperbarui hubungan dengan negara-negara Arab. Pada periode ketiga, Hosni Mubarak mengalami dua kali percobaan pembunuhan. Semasa periode ketiga ini, Hosni Mubarak aktif dalam melawan pengaruh-pengaruh dari kelompok ekstrimis Islam, termasuk Ikhwanul Muslimin. Ketika Hosni Mubarak terpilih kembali pada periode keempat dan kelima, rakyat Mesir melihat kemungkinan terjadinya praktek monarki. Hal ini disebabkan oleh semakin aktifnya Gamal Mubarak dalam panggung politik Mesir dan kenyataan bahwa Hosni Mubarak belum pernah menunjuk seorang wakil presiden. Suksesi presiden Mesir pada era Gamal Nasser dan Anwar Sadat menempatkan wakil presiden sebagai pengganti ketika presiden tidak dapat menjalankan tugasnya. Pada periode keempat dan kelima ini, rakyat Mesir banyak yang bertanya siapa yang menjadi presiden selanjutnya ketika Hosni Mubarak tidak dapat menjalankan tugasnya. Pada periode keempat dan kelima ini pula, Mesir dihadapkan pada permasalahan politik dan ekonomi yang semakin membuat rakyat curiga dan melakukan protes kepada Hosni Mubarak.

### **Kejatuhan Hosni Mubarak**

Tanggal 11 Februari 2011 merupakan hari dimana kekuasaan Presiden Mesir, Hosni Mubarak ditumbangkan, setelah kurang lebih 30 tahun berkuasa sejak 14 Oktober 1981. Hosni Mubarak dipaksa turun dari jabatannya oleh rakyat Mesir. Hasil pemilu tahun 2005 merupakan salah satu alasan mengapa rakyat Mesir menaruh kecurigaan kepada Hosni Mubarak. Hal ini dikarenakan terdapat aturan yang mewajibkan pegawai negeri untuk memilih Hosni Mubarak. Aturan tersebutlah yang membuat Ayman Nour, salah satu kandidat pemilu dipenjara karena mengkritiknya. Kemudian, selama masa pemerintahannya Hosni Mubarak juga menerapkan UU Keadaan Darurat yang dianggap memperbesar kekuasaan polisi serta menanggulhkan hak warga negara secara konstitusional sehingga pemerintah memiliki hak untuk menangkap tanpa alasan (Khasyi'in 2019). Namun, pemerintah Mesir mengungkapkan bahwa penerapan UU tersebut adalah untuk menangkai terorisme dan pengaruh kelompok Islam ekstrimis, termasuk Ikhwanul Muslimin.

Selain beberapa alasan politik tadi, kejatuhan Hosni Mubarak juga disebabkan karena permasalahan ekonomi yang menimpa Mesir. Permasalahan korupsi di dalam pemerintahan menjadi salah satu penyebab kondisi ekonomi Mesir yang cenderung stagnan. Selain itu, kondisi perekonomian negara juga diperparah dengan praktek monopoli yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintahan khususnya dari *National Democratic Party* (NDP) dan keluarga Hosni Mubarak (Khasyi'in 2019). Industri sumber daya alam besi dan baja juga dominan dikuasai oleh pejabat yang berasal dari NDP

(Khasyi'in 2019). Akibatnya, Mesir mengalami kenaikan dalam tingkat pengangguran, harga pangan, dan hutang negara.

Faktor dari luar negeri juga menjadi alasan mundurnya Hosni Mubarak dari kursi presiden Mesir. Kejatuhan pemerintahan Ben Ali di Tunisia seakan membangkitkan semangat perlawanan rakyat Mesir yang telah jenuh di bawah kuasa otoritarian Hosni Mubarak. Peristiwa yang telah terjadi di Tunisia dan yang akan dilaksanakan di Mesir ini kemudian menjadi salah satu bagian dari istilah yang dikenal sebagai *Arab Springs*. Selanjutnya, pada tanggal 25 Januari 2011, terjadi protes besar di Tahrir Square, Kairo. Tanggal tersebut dipilih karena merupakan hari kepolisian nasional di Mesir, sehingga menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap tindakan sewenang-wenang polisi. Protes tersebut menuntut Hosni Mubarak untuk mundur dari jabatannya karena menyebabkan permasalahan politik dan ekonomi yang sudah merugikan rakyat Mesir, termasuk golongan oposisi. Protes tersebut juga diikuti dan didukung oleh Ikhwanul Muslimin, Gerakan Kefaya, *April 6 Youth Movement*, dan kelompok oposisi lainnya.

### **Kontribusi Konsep Kenegaraan Al-Mawardi**

Peristiwa penggulingan pemimpin negara yang telah berkuasa selama kurang lebih 30 tahun tersebut dapat dilihat dari kacamata teori al-Mawardi. Perilaku Hosni Mubarak yang cukup membuat sengsara semua lapisan masyarakat Mesir membuat rakyatnya mulai kehilangan kepercayaan kepadanya. Hal tersebut sebenarnya sudah tertera dalam konsep kenegaraan al-Mawardi yang mengatakan bahwa kepatuhan rakyat kepada pemimpin itu bisa saja hilang jika ada tiga perkara. Perkara tersebut meliputi seorang pemimpin yang bersikap tidak adil dan berusaha menguntungkan golongannya, pemimpin yang kehilangan anggota tubuh atau akal entah itu fisik maupun non-fisik, pemimpin yang menjadi tawanan oleh raja lain yang membuat kemerdekaannya pun jadi hilang. Dalam kasus Hosni Mubarak, rakyat Mesir mulai kehilangan kepercayaan kepadanya itu berdasarkan aspek pertama yang berhubungan dengan perilaku adil. Kontrak sosial antara Mubarak dan rakyatnya pun berlangsung secara tidak baik sebab perilakunya sendiri.

Hal tersebut bisa dilihat dari perilaku Hosni Mubarak yang menerapkan prinsip *dictatorship* dalam menjalankan roda pemerintahannya. Salah satu buktinya adalah maraknya praktik korupsi dan angka pengangguran yang cukup tinggi membuat rakyat mesir semakin terpuruk (Nugroho, 2012). Jika dilihat dari sisi kasus korupsi, Mesir berada di urutan sangat bawah dalam daftar negara terbersih dari permasalahan tersebut pada tahun 2006. Sistem pemerintahan yang cenderung hancur membuat kondisi ekonomi dari berbagai aspek pun tidak stabil. Hal tersebut diperparah dengan tingkat pengangguran yang cukup tinggi yang didominasi oleh kaum-kaum pemuda. Mereka yang sudah lulus dari perguruan tinggi pun harus rela menganggur karena angka angkatan kerja yang terserap dalam setahun itu hanya sekitar empat persen. Dengan angka yang cukup buruk semacam

itu, hal tersebut pun menjadi patokan bagi rakyatnya untuk menyudahi kepercayaan terhadap pemimpinnya sendiri.

Tidak hanya dari segi ekonomi, Hosni Mubarak juga bermasalah dalam hal praktik demokrasi. Hal tersebut tertera pada kecurangan pemilu presiden pada tahun 2005. Hal itu dikemukakan oleh oposisi yang menganggap berlakunya masa jabatan Hosni Mubarak selama enam tahun ke depan membuat asas-asas demokrasi pun hilang. Kemenangan sebanyak 88 persen suara atau hampir keseluruhan dapat dikatakan tidak masuk akal sebab sebagian rakyatnya sudah disengsarakan oleh perilakunya. Ketika para panitia pemilu dituntut untuk melangsungkan pemungutan suara ulang, pihaknya pun menolak (Nugroho, 2012). Tidak hanya itu saja, rakyat yang menjadi oposisi Hosni Mubarak dalam pemilihan presiden diperlakukan secara kurang adil. Maksudnya di sini adalah mereka banyak diteror oleh para orang bayaran yang disewa oleh pihak pemerintah. Hal tersebut pun membuat praktik-praktik demokrasi berbalut otoritarian menjadi momok bagi masyarakat.

Kontribusi pemikiran al-Mawardi dalam kasus penggulingan Hosni Mubarak sudah terlihat jelas dari pola kepemimpinan beliau yang salah. Pada dasarnya, rakyat itu memiliki hak untuk mendapatkan apa yang harus mereka peroleh seperti kesejahteraan ekonomi, ketenteraman hidup, dan keadilan dari berbagai macam aspek. Padahal rakyatnya itu sudah menaruh kepercayaan kepada Hosni Mubarak dengan tetap membiarkan beliau memimpin Mesir dalam periode yang sangat lama. Hosni Mubarak yang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan golongannya membuat beliau tidak mencerminkan sifat-sifat *alraghbab*, *alrabbab*, dan *alinshaf* sehingga dalam konsep al-Mawardi dapat dikategorikan sebagai pemimpin yang patut dinonaktifkan.

Menanggapi kejadian semacam itu, rakyat pun telah melakukan langkah yang tepat dengan melengserkannya melalui revolusi. Tindakan semacam itu bertujuan agar pemimpin yang bersifat otoriter dan menyengsarakan rakyat pun mengakhiri masa jabatannya. Ditinjau dari pemikiran al-Mawardi, rakyat di dalam kasus ini merasakan kesengsaraan karena kebijakan-kebijakan Hosni Mubarak sehingga berhak terbebas dari belenggu tersebut. Menurut salah satu aspek pemimpin yang dikemukakan oleh al-Mawardi, Hosni Mubarak tidak berhasil melindungi dan menjaga kehormatan rakyat. Keadilan yang tidak dikelola dengan baik membuat rasa hormat rakyat terhadap Hosni Mubarak pun menjadi hilang. Dengan adanya hal tersebut, kemakmuran negara dan kesetiaan rakyat tidak didapatkan sehingga membuat Hosni Mubarak gagal menjadi pemimpin Mesir yang baik.

### **Idiosinkratik Hosni Mubarak**

Hosni Mubarak dalam indikator karakteristik individu memiliki tingkat *nationalism* yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari salah satu pencapaian internasionalnya, yaitu mengembalikan Mesir menjadi bagian dari dunia arab yang sudah menjadi identitas negara.

Selain itu, *nationalism* Hosni Mubarak juga tercermin dari riwayat ketika bergabung angkatan udara Mesir dan usahanya dalam melawan pengaruh dari kelompok ekstrimis Islam. Kemudian Hosni Mubarak memiliki tingkat *need for power* yang juga tinggi. Indikator kedua ini dapat dibuktikan dengan masa jabatan presiden Hosni Mubarak yang tidak sesuai dengan konstitusi Mesir. Terpilihnya kembali Hosni Mubarak sebagai presiden hingga empat kali tersebut disebabkan karena parlemen Mesir yang beranggotakan mayoritas dari partai NDP melakukan amandemen terhadap konstitusi tentang periode jabatan tersebut. Pada indikator *conceptual complexity*, Hosni Mubarak memiliki tingkat rendah. Hosni Mubarak sangat dekat dengan aktivitas partai NDP dan pada periode akhir jabatannya bersikap represif terhadap oposisinya. Hal ini menunjukkan bahwa Hosni Mubarak tidak menerima alternatif-alternatif dari pihak lain, dalam hal ini adalah oposisinya.

Selanjutnya, Hosni Mubarak memiliki tingkat *distrust to others* yang tinggi. Sejalan dengan *conceptual complexity*, Hosni Mubarak menunjukkan sikap tidak kooperatif terhadap kelompok oposisi, termasuk Ikhwanul Muslimin. Terakhir, Hosni Mubarak memiliki tingkat *belief in own ability control events* yang tinggi. Hal ini juga dibuktikan oleh tekad kuat dari Hosni Mubarak untuk terus memimpin Mesir. Selain itu, indikator tersebut juga didukung oleh kenyataan bahwa Hosni Mubarak sebagai aktor kepala negara tunggal tanpa wakil presiden. Sehingga, menurut model yang dicetuskan oleh Margaret Hermann, Hosni Mubarak dapat didefinisikan sebagai pemimpin yang memiliki sifat agresif.

## **Kesimpulan**

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh Hosni Mubarak memang tidak mencerminkan sosok sebenarnya seorang pemimpin. Jika ditinjau dari perspektif menurut konsep kenegaraan al-Mawardi, Hosni Mubarak tidak melakukan keseluruhan tugas dasar dari seorang pemimpin. Hosni Mubarak yang terlalu bersikap otoriter dan tidak mengedepankan keadilan bagi rakyat membuat beliau mendapatkan balasan setimpal. Salah satu contohnya adalah hilangnya kepercayaan rakyat karena beliau telah menodai kontrak sosial yang sebelumnya telah diberikan. Padahal seorang pemimpin dan rakyat itu harus saling beriringan dalam menjalankan kewajiban dan tugasnya.

Mawardi berpendapat bahwa seorang pemimpin harus melayani dan menjaga keadilan bagi rakyatnya, sedangkan rakyat memiliki tanggung jawab untuk tunduk dan menghormati seorang pemimpin. Tidak adanya keharmonisan antara rakyat dan pemimpin yang dikarenakan oleh sikap otoriter membuat negara menjadi hancur. Hal tersebut terbukti pada perekonomian Mesir yang pada masa kepemimpinan Hosni Mubarak mengalami kemunduran secara signifikan. Selain itu, menurut model idiosinkratik Margaret Hermann, Hosni Mubarak dapat dikategorikan sebagai pemimpin agresif yang mengedepankan dalam hal yang “berbau” kekuasaan dan pengaruh. Hosni Mubarak juga

mendapat protes dari rakyat Mesir karena “membungkam” aktivitas politik dari kelompok oposisi dengan menetapkan peraturan yang malah memperkuat legitimasinya.

### **Daftar Pustaka**

- Ahyar, M. (2018). Al Mawardi dan konsep Khilafah islamiyyah: Relevansi Sistem Politik Islam Klasik dan Politik Modern. *Al A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 1-26.
- al-Ayyubi, S. (2016). Pengaruh Perang Dunia II Terhadap Revolusi Mesir 1952. *Buletin Al-Turas*, 273-285.
- Diana, R. (2014). Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dan Islam. *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, 157-176.
- Ghafur, M. F. (2014). Agama dan Demokrasi: Munculnya Kekuatan Politik Islam di Tunisia, Mesir, dan Libya. *Jurnal Penelitian Politik*, 85-100.
- Harto, F. F. (2013). Faktor-faktor yang Menyebabkan Hosni Mubarak Turun dari Kursi Kepresidennya. *Repository Unri*, 1-10.
- Hermann, M. G. (1980). Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristics of Political Leaders. *International Studies Quarterly*, 24(1), 7-45. <https://doi.org/10.2307/2600126>
- Khasyi'in, N. (2019). The Fall Of President Muhammed Hosni Mubarak And The Prospects For Democratization In Egypt. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 19(1), 33-50. <https://doi.org/10.18592/sy.v19i1.2640>
- Laksono, D. A. (2018). Pengaruh Idiosinkratik Shinzo Abe Terhadap Upaya Perubahan Kebijakan Luar Negeri Jepang Dari Pasifisme Idealis Menjadi Pasifisme Proaktif. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 7(3), 58-69. <http://journal.unair.ac.id/JAHI@pengaruh-idiosinkratik-shinzo-abe-terhadap-upaya-perubahan-kebijakan-luar-negeri-jepang-dari-pasifisme-idealisme-menjadi-pasifisme-proaktif-article-12585-media-131-category-8.html>
- Moleong, L. J. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nandareska, I. V. (2018). Implikasi Idiosinkratik Barack Obama terhadap Kebijakan Kerjasama Kontraterorisme Amerika-Arab Saudi. *Journal of International Relations*, 4(3), 589-596. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>
- Nugroho, T. D. (2012). Runtuhnya Rezim Hosni Mubarak Tahun 2011 (Antara Diktatorisme dan Demokrasi di Mesir). *Skripsi Universitas Sebelas Maret*, 1-102.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. ALFABETA.
- Syam, S. (2018). Indonesia, Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 485-498.

- The Editors of Encyclopaedia Britannica. (2021, April 30). Hosni Mubarak | Biography, History, & Facts. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/biography/Hosni-Mubarak>
- Trisnawati, D. (2016). Revolusi Mesir 23 Juli 1952: Berakhirnya Pemerintahan Raja Farouk. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 1-17.
- Wasiuddin, A. (2021). Dinamika Politik Pemerintahan Hosni Mubarak di Mesir Tahun 1981-2011 dan Kejatuhannya. Doctoral Dissertation UIN SMH Banten, 1-12.
- Wijaya, D. N. (2016). Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes dan John Locke. *Jurnal Sosiologi. Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 183-193.